PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DENGAN PERSEPSI KEMANFAATAN, SIKAP PENGGUNA DAN PERILAKU UNTUK TETAP MENGGUNAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(*Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang*)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

SATRIA MUHAMMAD ANSHAR

67562/2005

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi SIKD dengan Persepsi Kemanfaatan, Sikap Pengguna dan Perilaku Untuk Tetap Menggunakan sebagai Varibel Intervening

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)

Nama	: Satria Muhammad Anshar
NIM/BP	: 67562/2005
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Maret 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: **Lili Anita, SE, M.Si, Ak**	
2. Sekretaris	: **Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**	
3. Anggota	: **Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**	
4. Anggota	: **Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak**	

ABSTRAK

Satria Muhammad (67562) : Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Persepsi Kemanfaatan, Sikap Penggunaan dan Perilaku Untuk Tetap Menggunakan sebagai Variabel *Intervening*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2012.

Pembimbing : 1. Lili Anita, S.E, M.Si, Ak
2. Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Persepsi Kemanfaatan. 2) Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Sikap Penggunaan. 3) Pengaruh Persepsi Kemanfaatan terhadap Sikap Penggunaan. 4) Pengaruh Persepsi Kemanfaatan terhadap Perilaku Untuk Tetap Menggunakan. 5) Pengaruh Sikap Pengguna terhadap Perilaku Untuk Tetap Menggunakan. 6) Pengaruh Perilaku untuk Tetap Menggunakan terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi SIKD.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kota Padang. Teknik pengambilan sampelnya yaitu *total sampling*. Analisis data menggunakan *path analysis*.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Persepsi Kemanfaatan. (2) Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Sikap Penggunaan. (3) Persepsi Kemanfaatan berpengaruh signifikan positif terhadap Sikap Penggunaan. (4) Persepsi Kemanfaatan berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Untuk Tetap Menggunakan. (5) Sikap Penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Untuk Tetap Menggunakan. (6) Perilaku Untuk Tetap Menggunakan berpengaruh signifikan positif terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi SIKD.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan: (1) Untuk pemerintah daerah, hendaknya lebih meningkatkan Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kemanfaatan, Sikap Pengguna dan Perilaku Untuk Tetap Menggunakan sehingga Keberhasilan Implementasi Aplikasi SIKD menjadi lebih baik. (2) Untuk penelitian selanjutnya, dapat lebih baik jika, dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian. (3) Untuk peneilitan selanjutnya, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi SIKD, maka hendaknya penilaian selanjutnya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehinga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Persepsi Kemanfaatan, Sikap Penggunaan dan Perilaku Untuk Tetap Menggunakan sebagai Variabel *Intervening***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Lili Anita, SE, MSi, Ak selaku pembimbing I, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ayah dan ibu, Kakak beserta Adik-adik dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2005 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesain skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sktripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Pembatasan Masalah 10

D. Perumusan Masalah 10

E. Tujuan Penelitian 11

F. Manfaat Penelitian 12

BAB II. KAJIAN TEORI 14

A. Kajian Teori 14

1. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 14

2. Technology Acceptance Model 37

B. Penelitian Terdahulu 42

C. Pengembangan Hipotesis 44

D. Kerangka Konseptual 50

BAB III. METODE PENELITIAN 51

A. Jenis Penelitian 51

B. Populasi Dan Sampel 51

C. Jenis Dan Sumber Data 53

D. Teknik Pengumpulan Data 54

E. Variabel Penelitian 54

F. Instrumen Penelitian 55

G. Uji Validitas Dan Reliabilitas 57

H. Uji Asumsi Klasik 59

I. Teknik Analisis Data 60

J. Defenisi Operasional 68

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 70

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 70

B. Demografi Responden 71

C. Uji Validitas dan Realibilitas 74

D. Uji Asumsi Klasik 76

E. Deskripsi Variabel Penelitian 80

F. Statistik Deskriptif 86

G. Analisis Data 87

H. Pengujian Hipotesis 97

I. Pembahasan 102

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 108

A. Kesimpulan 108

B. Keterbatsan dan Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang 52
2. Skala Pengukuran 56
3. Instrumen Penelitian 56
4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation..... 59
5. Tingkat Pengembalian Kuisioner 71
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 71
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 72
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 73
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menduduki Jabatan..... 74
10. Nilai *Coerrected Item-Total Correlation* Terkecil 75
11. Nilai *Cronbach's Alpha* 76
12. Uji Normalitas 77
13. Uji Heterokedastisitas ……..... 78
14. Uji Multikolinieritas ……..... 79
15. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan 80
16. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Kemanfaatan 81
17. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Sikap Pengguna 83
18. Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Untuk Tetap Menggunakan ... 84
19. Distribusi Frekuensi Variabel Keberhasilan Implementasi SIKD 85

20. Statistik Deskriptif 87

21. Koefisien Determinasi Substruktur 1 88

22. Koefisien Regresi Substruktur 1 88

23. Koefisien Determinasi Substruktur 2 89

24. Koefisien Regresi Substruktur 2 90

25. Koefisien Determinasi Substruktur 3 91

26. Koefisien Regresi Substruktur 3 92

27. Koefisien Determinasi Substruktur 4 93

28. Koefisien Regresi Substruktur 4 94

29. Rekapitulasi Pengaruh Variabel Penyebab Terhadap Akibat 96

30. Uji F Hitung 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Anggaran SKPD …… 25
2. Kerangka Konseptual 50
3. Substruktur 1 63
4. Substruktur 2 63
5. Substruktur 3 64
6. Substruktur 4 64
7. Substruktur 1 89
8. Substruktur 2 91
9. Substruktur 3 93
10. Substruktur 4 94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Format Kuesioner 113
2. Tabulasi Data Penelitian 118
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian 133
4. Statistik Deskriptif 137
5. Analisis Data 138
    1. Substruktur 1 138
    2. Subsrtuktur 2 138
    3. Substruktur 3 139
    4. Substruktur 4 140
6. Uji Asumsi Klasik 141
    1. Uji Normalitas 141
    2. Uji Multikolonearitas 141
    3. Uji Heterokedastisitas 142
7. Uji Hipotesis 143
    1. Uji t 143
    2. Uji F 143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem informasi merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Kelangsungan hidup perusahaan sangatlah sulit tanpa penggunaan dari teknologi sistem informasi. Sistem informasi menjadi penting membantu jalannya perusahaan dalam menghadapi pesatnya arus ekonomi global. Menurut Loudon (2008) sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Sistem informasi menjadi vital untuk menjalankan bisnis harian serta mencapai tujuan bisnis dan tujuan strategi dibanyak perusahaan.

Sama halnya dengan kebutuhan sistem informasi di sektor swasta, di sektor pemerintahan kebutuhan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) tak terkecuali dalam hal pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, kegiatan pengendalian berupa pengelolaan sistem informasi adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan demi menjamin suatu aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh Instansi Pemerintah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan dapat memberikan jaminan pengendalian intern yang memadai.

Aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah alat yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dan dikenal dengan Aplikasi SIKD merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya.

Menurut Djaja (2009) Aplikasi SIKD merupakan aplikasi *database* yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIKD dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun dalam pengimplementasiannya sangat tergantung pada sistem dan prosedur yang diterapkan oleh pengguna akhir (*end users*). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam keberhasilan mengimplementasikan Aplikasi SIKD untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemerintah daerah saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan LKPD yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Menurut Indra (2006) laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya

manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Djadja (2009) kebehasilan pengimplementasian Aplikasi SIKD dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pemahaman pemerintah daerah dalam penyusunan LKPD dengan menggunakan teknologi informasi oleh pengguna akhir (*end users*) atau pemahaman dalam mengikuti alur transaksi keuangan daerah dengan menggunakan Aplikasi SIKD. Sedangkan menurut Seddon (1997) dengan mengatasi kelemahan aplikasi agar menjadi lebih baik, kepuasan pengguna akhir (*end users*) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi *software* akuntansi yang digunakan pada sebuah organisasi.

Teori perilaku banyak digunakan sebagai dasar untuk mengkaji proses adopsi teknologi sistem informasi oleh pengguna akhir (*end users*), diantaranya adalah *Theory of Reason Action* (Fishbe dan Ajzen, 1975), *Theory of Planned Behavior* (Taylor dan Todd, 1995), dan *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989).

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model penelitian yang paling luas digunakan untuk meneliti adopsi teknologi informasi. Lee, Kozar dan Larsen (2003) dalam Titis (2008) menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 18 tahun terakhir TAM merupakan model yang paling popular dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian mengenai proses adopsi teknologi informasi baru. Kesederhanaan dan kemampuan menjelaskan hubungan sebab akibat merupakan alasan utama penggunaan TAM. Tujuan dari TAM adalah untuk menyediakan

sebuah penjelasan secara umum mengenai hal-hal yang menentukan penerimaan teknologi dan TAM diharapkan mampu menjelaskan perilaku pengguna dalam rentang yang lebar pada pengguna akhir (*end users*) dan populasi pengguna.

TAM menganggap bahwa 4 keyakinan individual, yaitu persepsi tentang kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi sikap penggunaan dan perilaku untuk tetap menggunakan merupakan determinan utama perilaku adopsi dan akhirnya menggunakan teknologi. Penelitian ini juga menggunakan TAM sebagai model dasar untuk mengukur keberhasilan implementasi Aplikasi SIKD dalam penyusunan LKPD.

Menurut Davis (1989) persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah sistem teknologi informasi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa suatu sistem informasi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan, dapat meningkatkan keterampilan pengguna, serta mudah dioperasikan. Persepsi kemudahan penggunaan suatu sistem teknologi informasi akan berpengaruh terhadap manfaat yang dapat dirasakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Kemudahan memberikan indikasi bahwa setiap organisasi yang bekerja menggunakan TI lebih mudah dibandingkan dengan organisasi yang bekerja tanpa menggunakan TI (secara manual). Disamping itu mudah atau tidaknya penggunaan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap sikap penerimaan atau penolakan teknologi informasi tersebut oleh pengguna akhir (*end users*). Hal ini didukung oleh teori UTAUT (*Unified Theory of Acceptance Use of Technology*) yang dikembangkan Venkatesh (2003), yang menyatakan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi informasi

dipengaruhi oleh faktor tingkat Kemudahan Penggunaan dalam menggunakan sistem.

Persepsi kemanfaatan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya, meningkatkan prestasi kerja, menjadikan pekerjaan lebih mudah, menambah produktivitas, dan mengembangkan kinerja pekerjaan. Manfaat dari teknologi informasi merupakan harapan terhadap sikap dalam menggunakan dan perilaku apakah teknologi informasi tersebut tetap digunakan di kemudian hari.

Persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan akan menentukan sikap pengguna akhir (*end users*) dari sebuah sistem informasi, kemudian mempengaruhi perilaku pada penggunaan sistem secara nyata, dan berdampak terhadap keberhasilan implementasi suatu sistem teknologi (Imam : 2009). Penelitian ini menggunakan sikap penggunaan dan perilaku untuk menggunakan Aplikasi SIKD sebagai variabel intervening. Variabel intervening merupakan tipe variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi hubungan langsung dan tidak langsung (Nazir : 2006).

Sikap penggunaan dalam TAM dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Iqbaria (1994) menyebutkan secara individu maupun kolektif penerimaan penggunaan dapat dijelaskan dari variasi penggunaan suatu sistem, karena diyakini penggunaan suatu sistem yang berbasis TI dapat mengembangkan kinerja individu atau kinerja

organisasi. Dengan meningkatkan meningkatnya kinerja individu maupun organisasi akan menimbulkan faktor sikap pengguna. Faktor sikap merupakan aspek yang mempengaruhi perilaku individu untuk tetap menggunakan teknologi informasi.

Perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi dapat dilihat dari sikap perhatiannya terhadap teknologi informasi tersebut. Perilaku merupakan bentuk keinginan untuk tetap menggunakan, keinginan menambah fitur pendukung, serta terpengaruh untuk memotivasi orang lain menggunakan teknologi tersebut. Sehingga dengan memperhatikan perilaku pengguna maka dapat dilihat apakah suatu teknologi informasi berhasil atau tidak dalam pengimplementasiannya.

Implementasi Aplikasi SIKD oleh SKPD adalah dalam rangka mempercepat pemerintah daerah menyusun LKPD dan diharapkan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai dengan tahun 2008, SIMDA telah diimplementasikan pada 200 pemerintah daerah atau meningkat sebanyak 37 pemerintah daerah jika dibandingkan tahun 2007 saat Aplikasi SIMDA pertama kali diperkenalkan sebanyak 163 pemerintah daerah (www.bpkp.go.id). Akan tetapi yang telah menghasilkan LKPD dengan Aplikasi SIKD secara utuh baru sekitar 100 pemerintah daerah. Dan tingkat ketepatan waktu penyelesaian LKPD tersebut juga beragam, ada yang telah selesai 2-3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ada juga yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.

Menurut fakta yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman merupakan salah satu pemerintah daerah yang cukup berhasil mengimplementasikan Aplikasi SIKD sejak tahun 2008 dalam pengelolaan

keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan opini audit LKPD dari *disclaimer* pada tahun 2008 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2009.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman menyadari perlunya menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat mendukung kredibilitas dari pemerintah daerah, apabila pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik maka menghasilkan LKPD yang baik pula. Hal ini juga didorong dengan semakin gencarnya pemberitaan di media surat kabar maupun elektronik mengenai pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan LKPD yang masih melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas 191 LKPD tahun 2008, sebanyak 72 LKPD memperoleh opini d*isclaimer*, 8 LKPD memperoleh memperoleh opini Tidak Wajar (TW), 110 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan hanya 1 LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini memperlihatkan masih buruknya kualitas pelaporan keuangan daerah (www.detikfinance.com).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Titis (2008) yang menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat dan kepercayaan konsumen terhadap pengaplikasian layanan *mobile banking*. Hasilnya persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan *mobile banking*.

Kemudian penelitian yang dilakukan Arief (2007) yang membahas kajian tentang perilaku pengguna sistem informasi mahasiswa dan akademik berbasis web (SIMA web) dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Hasilnya persepsi terhadap penggunaan, persepsi kemanfaatan, dan perilaku untuk tetap menggunakan berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan sistem informasi mahasiswa dan akademik berbasis web. Sedangkan persepsi sikap penggunaan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan sistem informasi mahasiswa dan akademik berbasis web, hal mengacu pada kenyataan bahwa para responden (mahasiswa) memang dituntut untuk mengakses web karena sebagian besar fitur web, meliputi prosedur Kartu Rencana Studi (KRS) informasi bimbingan tugas akhir, dan tugas-tugas perkuliahan.

Imam (2009) yang meneliti tentang analisis *technology acceptance model* terhadap perpustakaan digital dengan *structural equation modeling* menyatakan bahwa terdapat pengaruh desain portal, organisasi *e-resource,* dan kemampuan pengguna terhadap kemudahan penggunaan perpustakaan digital. Kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi manfaat perpustakaan digital. Serta persepsi manfaat berpengaruh terhadap sikap ke arah penggunaan dan niat untuk tetap menggunakan perpustakaan digital.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan TAM untuk mengetahui keberhasilan implementasi Aplikasi SIKD dalam penyusunan LKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kota Padang akan dijadikan sebagai objek penelitian, karena SKPD di

Kota Padang telah mengimplementasikan Aplikasi SIKD dalam penyusunan LKPD.

Penelitian ini penting untuk diteliti untuk mengkaji manfaat dari Aplikasi SIKD bagi pemerintah daerah dalam penyusunan LKPD. Tujuannya adalah membantu pemerintah dalam menggunakan dan mengatur sumberdaya yang ada dan meningkatkan efektivitasnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan bertitik tolak dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Persepsi Kemanfaatan, Sikap Penggunaan, dan Perilaku Untuk Tetap Menggunakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD di Kota Padang).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem informasi berbasis komputer berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.
2. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
3. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
4. Persepsi kemanfatan berpengaruh terhadap persepsi sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

5. Persepsi kemanfatan berpengaruh terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
6. Persepsi sikap penggunaan berpengaruh terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
7. Perilaku untuk tetap menggunakan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
8. Implementasi Aplikasi SIKD berpengaruh terhadap opini pelaporan LKPD.

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Mengingat banyaknya metode untuk mengkaji proses adopsi teknologi sistem informasi oleh pengguna akhir (*end users*), untuk itu peneliti membatasi penelitian pada penggunaan metode Technology Acceptance Model (TAM) yang menggunakan indikator persepsi tentang kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi sikap penggunaan dan perilaku untuk tetap menggunakan sebagai ukuran keberhasilan pengimplementasian teknologi sistem informasi baru.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat ditimbulkan berdasarkan identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Sejauhmana persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)?

2. Sejauhmana persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)?
3. Sejauhmana persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap persepsi sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)?
4. Sejauhmana persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)?
5. Sejauhmana persepsi sikap penggunaan berpengaruh terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)?
6. Sejauhmana perilaku untuk tetap menggunakan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi kemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
2. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
3. Pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap persepsi sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

4. Pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
5. Pengaruh persepsi sikap penggunaan terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
6. Pengaruh perilaku untuk tetap menggunakan terhadap keberhasilan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi instansi pemerintah, pembaca, peneliti lain maupun bagi penulis sendiri:

1. Bagi Penulis:
   a. Menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
   b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan praktik yang sesungguhnya terjadi.
2. Bagi Akademis

   Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi dunia akademik tentang pengaruh persepsi tentang kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi sikap penggunaan dan perilaku untuk tetap menggunakan sebagai ukuran keberhasilan teknologi sistem informasi.
3. Bagi Pemerintah Daerah

   Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah khususnya SKPD yang menyusun LKPD agar menghasilkan opini pelaporan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

a. Pengertian

Jika diartikan secara parsial Laudon (2007) mendefinisikan sistem informasi sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Tata (2005) berpendapat bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sedangkan menurut Romney (2006) sistem informasi adalah suatu sistem yang tujuannya menghasilkan keluaran (*output*) informasi yang berguna, relevan (*relevance*), tepat waktu (*timesliness*) dan tepat nilainya atau akurat (*accurate*). Keluaran yang tidak didukung oleh tujuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna bagi suatu organisasi, tetapi hanya merupakan sampah (Jogianto : 2000).

Informasi sendiri menurut Laudon (2007) berarti data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Sebaliknya, data merupakan sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik organisasi.

Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam sebuah organisasi sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Begitu juga dalam pemerintahan, informasi telah menjadi aktiva tidak berwujud, yang jika dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah sudah mulai mengembangkan dan memberikan perhatian khusus pada tekonologi informasi sebagai sumber yang memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan informasi secara efektif. Salah satu bentuk perhatian ini adalah penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan berbasis komputer yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri yaitu Aplikasi SIKD yang bertujuan untuk untuk membantu dalam penyusunan LKPD.

Ahmad (2002) mendefiniskan Aplikasi SIKD sebagai berikut:

> Aplikasi SIKD adalah aplikasi yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana tujuan dari penggunaan aplikasi ini adalah untuk mendokumentasikan, mangadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah harus diatur atau ditetapkan melalui produk hukum pemerintah daerah yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan pemerintah pusat. Produk tersebut antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 19(6))
2) Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan APBD (UU No.17 Tahun 2003 pasal 26(2))
3) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Uang Daerah (UU No. 1 Tahun 2004 pasal 28(2,3))
4) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengeluaran (PP No. 58 Tahun 2005 pasal 94)
5) Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah (PP No. 58 tahun 205 pasal 150 (1)), (Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 330 (1))
6) Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 58 pasal 151(2)), (Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 330 (2))
7) Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 232, 233)
8) Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Permendagri no. 13 tahun 2006 pasal 5 (2)

Pelaksanaan lebih lanjut peraturan pemerintah daerah tersebut, selain dituangkan dalam bentuk produk hukum pemerintah pemerintah daerah yng berperan sebagai manual prosedur pengelolaan keuangan daerah, juga perlu direalisasikan dalam bentuk sistem informasi yang terkomputerisasi, salah satunya adalah Aplikasi SIKD.

Program Aplikasi SIKD dikembangkan mengacu pada ketentuan perundang-undangan pemerintah pusat, praktik pengelolaan keuangan yang terbaik dan pengendalian intern yang memadai. Sifat dari pengembangan Aplikasi SIKD adalah ditujukan untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah sehingga perlu ada penyesuaian sistem dan prosedur pengelolaan keuangan apabila pemerintah akan mengimplementasikan Aplikasi SIKD tersebut pada daerahnya.

Di dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005, dinyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari Aplikasi SIKD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Aplikasi SIKD yang dibangun untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah juga dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1) Menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses secara lengkap sekali saja
2) Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti
3) Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya
4) Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan
5) Menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi dijalankan dalam jangka waktu yang lama.

b. Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Di dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan peraturan nomor 24 Tahun 2005, tujuan LKPD seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan peraturan perundang-undangan;
3) Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan barkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen LKPD yang harus disusun oleh pemerintah daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1) Neraca
2) Laporan Realisasi Anggaran
3) Laporan Arus Kas, dan
4) Catatan atas Laporan Keuangan

Di dalam penyusunan LKPD tentunya dibutuhkan perangkat-perangkat pendukung, seperti:

1) Peraturan daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2) Keputusan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
3) Keputusan kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyiapkan sumber daya manusianya agar mempunyai keahlian untuk dapat menyusun LKPD.

c. Fungsi-fungsi pengelolaan keuangan daerah

Akselerasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif apabila fungsi-fungsi pengelolaan keuangan berjalan secara terintegrasi. Fungsi-fungsi tersebut adalah perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan (Abdul : 2002).

Untuk dapat mendukung akselerasi reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka menurut Djadja (2009) Aplikasi SIKD dikembangkan

secara terintegrasi dengan memperhatikan fungsi-fungsi yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Fungsi Perencanaan

   Sebelum memasuki tahap penganggaran, terlebih dahulu pemerintah daerah wajib untuk menyusun/menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran.

2) Fungsi Penganggaran

   Dengan telah ditetapkannya program dan kegiatan barulah pemerintah daerah dapat melakukan proses penginputan data anggaran.

3) Fungsi Penatausahaan

   Dengan telah ditetapkannya APBD yang dihasilkan dari Aplikasi SIKD, maka berdasarkan APBD tersebut pemerintah daerah dapat melaksanakan realisasi kegiatannya dan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan penatausahaan ini dihasilkan dari Aplikasi SIKD.

4) Fungsi Pertanggungjawaban dan Pelaporan

   Bedasarkan anggaran dan penatausahaan, Aplikasi SIKD dapat secara otomatis menyusun laporan keuangan, seperti neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Tidak hanya laporan pokok saja, tetapi juga dihasilkan laporan-laporan yang dapat membantu pemerintah daerah di dalam melakukan analisa dan verifikasi.

d. Administrator Aplikasi SIKD

Menurut Djadja (2009) Apliksi SIKD merupakan suatu program yang dikembangkan dengan menggunakan *database. Database* menurut Laudon (2007) merupakan sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redudansi data.

Aplikasi SIKD telah terintegrasi mulai dari fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah, sampai fungsi akuntansi dan pelaporan. Maka dalam setiap implementasi suatu sistem berbasis komputer, perlu ditunjuk pihak yang berperan sebagai administrator. Administrator mempunyai fungsi untuk mengelola *database*, mengelola aplikasi (*sotfware*) dan *hardware*. Pada masing-masing SKPD yang menjadi administrator adalah Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pengguna akhir (*end users*) dari Aplikasi SIKD.

Secara umum menurut Djadja (2009) tugas seorang administrator Aplikasi SIKD adalah sebagai berikut:

1) Setting jaringan

   Sebaiknya seorang administrator paham tentang jaringan komputer sehingga jika terjadi permasalahan dapat memberikan solusi dan dapat mengelola aplikasi dengan baik.

2) Instalasi aplikasi

Instalasi Aplikasi SIKD pada saat pertama kali implementasi akan dilakukan oleh Tim Pengembang Aplikasi SIKD dari Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah perwakilan BPKP setelah semua persyaratan dan spesifikasi dalam pedoman implementasi dipenuhi. Sedangkan proses instalasi aplikasi berikutnya atau melakukan instalasi kembali Aplikasi SIKD maka menjadi tanggung jawab administrator.

3) Memberikan otorisasi *password*

Memberikan *password* otorisasi merupakan salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh seorang administrator. Dalam memberikan otorisasi harus mempertimbangkan kewenangan, tugas dan tangung jawab dari pengguna *password* dan dalam memberikan *password* level password yang diberikan adalah level operator. Seorang administrator tidak diperbolehkan memberikan *password* kepada level admin atau memberikan *user ID* dan *password* administrator yang dipercayakan kepada orang lain.

4) *Update* aplikasi

Aplikasi SIKD merupakan salah satu bagian dari rencana pengembangan sistem yang terintegrasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri. Oleh karena itu akan ada *update* aplikasi dengan versi yang terbaru. Untuk melakukan *update* terhadap Aplikasi SIKD telah tersedia sarana (*tools*) untuk melakukan *update*. Administrator cukup menjalankan aplikasi *tools* tersebut.

5) *Uninstall* aplikasi

Proses ini bisa dilakukan seandainya terjadi kegagalan dalam proses instalasi sehingga Apliksi SIKD tidak berjalan sebagimana mestinya.

6) *Restore database*

Merupakan proses yang dilakukan untuk menempatkan *file database* ke dalam *software database Microsoft SQL Server* agar *database* tersebut dapat digunakan.

7) *Backup database*

Backup database merupakan salah satu proses pengamanan data yang dilakukan secara periodik.

8) Setting aplikasi

Proses ini dimaksudkan untuk mengamankan data yang dilakukan dengan membuat *user* dan mengatur batasan-batasannya.

Selain hal-hal tersebut di atas menurut Djadja (2009) seorang administrator Aplikasi SIKD diharapkan bertindak sebagai *troubleshooter* yaitu mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan implementasi suatu apliksi.

e. Prosedur System Requirement Kebijakan Penatausahaan Keuangan dengan Menggunakan Aplikasi SIKD

1) Penyusunan Anggaran Kas

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 125 menyatakan bahwa Kepala SKPD berdasarkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) menyusun rancangan anggaran kas SKPD, kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD tersebut.

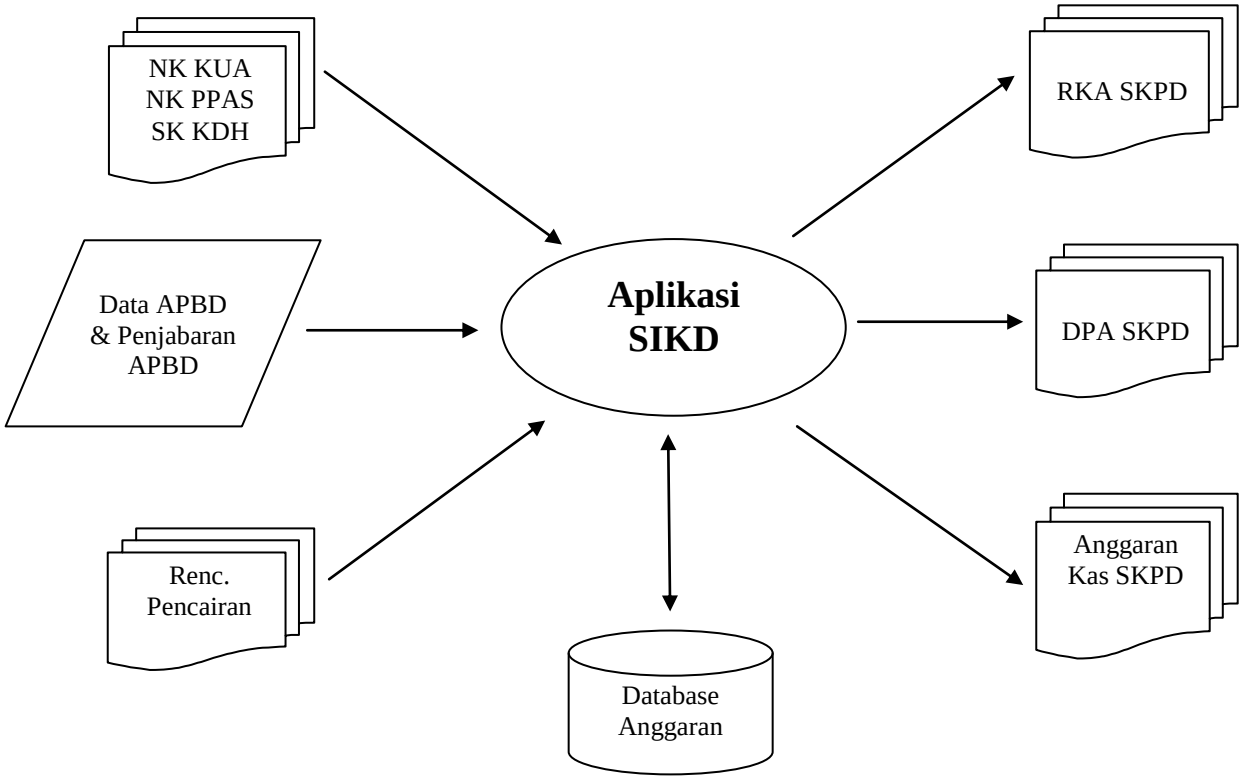

Gambar 1
Anggaran SKPD

Dalam Aplikasi SIKD, rancangan anggaran kas disusun oleh SKPD bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Hal

ini dimaksudkan agar waktu yang digunakan dalam pembahasan dan penetapan DPA lebih singkat karena rancangannya sudah ada, sehingga hanya melakukan perbaikan pada hal-hal yang tidak disetujui/harus diubah menurut pembahasan DPRD.

Berdasarkan rancangan anggaran kas dari SKPD maka PPKD selaku BUD juga dapat menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas pemerintah daerah yang telah ditetapkan akan menjadi dasar bagi PPKD untuk menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dalam rangka manajemen kas.

Jadi dalam Aplikasi SIKD yang harus diperhtikan dalam penyusunan anggaran kas SKPD adalah :

a) Anggaran kas dibuat SKPD bersamaan dengan pemyusunan RKA
b) Anggaran kas dibuat dengan mengalokasikan anggaran per rekening untuk satu tahun anggaran (dalam jangka waktu 12 bulan)
c) Anggaran kas dibuat per bulan, namun demikian laporan yang dihasilkan berupa anggaran kas triwulanan.

Anggaran kas yang dihasilkan dari Aplikasi SIKD akan bermanfaat untuk :

a) Mempermudah pengalokasian dana pada saat pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)

b) Data rincian rencana penggunaan dana pada SPD dapat diambil langsung dari data anggaran kas yang telah dibuat.

2) Penyusunan DPA

Setelah RAPBD disetujui oleh DPRD, maka Perda APBD, Penjabaran APBD dapat disahkan dan dicetak dengan menggunakan Aplikasi SIKD dengan cara melakukan posting data anggaran. Posting data anggaran hanya boleh dilakukan sekali saja karena hal ini dilakukan sebagai proses legalisasi APBD dalam Aplikasi SIKD. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa RKA sudah benar dan sudah sesuai dengan persetujuan DPRD.

Setelah proses pengesahan APBD maka PPKD harus mengesahkan DPA. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan DPA adalah:

a) Nomor DPA ditetapkan secara otomatis oleh Aplikasi SIKD.
b) Penetapan DPA dengan Aplikasi SIKD hanya manambahkan tanggal penetapan DPA saja (dilakukan oleh SKPD).
c) DPA disusun dan ditetapkan per kegiatan.
d) Dalam laporan DPA, jika anggaran kas tidak diisi maka rencana pencairan dana yang dibagi per triwulan tidak akan dapat disajikan.

3) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1 poin 64 menyatakan bahwa Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk malaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan, tetapi tidak untuk kegiatan secara tersendiri.

Setelah penetapan anggaran kas, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD kemudian disiapkan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk ditandatangani oleh PPKD. Setelah disahkan oleh PPKD maka SPD akan diserahkan kembali ke Pengguna Anggaran di masing-masing SKPD serta diteruskan ke Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK).

Rancangan SPD yang dibuat akan berisi jumlah penyediaan dana yang dibutuhkan, baik untuk mengisi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), dan pembelian barang dan jasa modal, maupun peggajian dan tunjangan.

Dalam Aplikasi SIKD, SPD diterbitkan oleh BUD dapat berdasarkan anggaran kas yang sudah dibuat oleh SKPD dan sudah ditetapkan sebagai anggaran kas pemerintah daerah. Pembuatan SPD

dengan menggunakan Aplikasi SIKD dapat dibuat per kegiatan atau beberapa kegiatan atau beberapa kegiatan sekaligus dalam satu SPD.

4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1 menyatakan bahwa uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD, uang persediaan yang telah diberikan kepada pengguna anggaran akan dikelola oleh bendahara pengeluaran. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan manggunakan SPP-GU.

Pengajuan SPP Uang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIKD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Besaran uang persediaan harus ditetapkan dengan SK Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan operasional setiap bulan dan berdasarkan ketersediaan kas di BUD.
- SPP UP diterbitkan hanya sekali setahun pada awal/dimulainya penatausahaan keuangan.
- SPP UP diterbitkan untuk satu SKPD, bukan per kegiatan.
- Uang Persediaan dapat digunakan untuk semua kegiatan.

- Uang Persediaan merupakan uang muka operasional dan belum membebani anggaran.
- Uang Persediaan langsung menunjuk pada rekening kas di bendahara pengeluaran.
- Uang Persediaan dapat diberikan penggantian dengan cara pengajuan SPP GU.
- Uang Persediaan akan diganti sebesar SPJ yang dibuat PPTK dan disahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

b) SPP Ganti Uang (SPP-GU)

SPP GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU bertujuan untuk memperoleh pengesahan dari pengguna anggaran melalui PPK. SPP-GU yang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Maka SPP-GU hanya ada jika UP sudah habis.

Pengajuan SPP-GU dengan menggunakan Aplikasi SIKD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Ganti Uang merupakan mekanisme penggantian UP yang dapat dilakukan kapan saja sesuai ketentuan pemerintah daerah yang

bersangkutan, misalnya 75%, 80%, atau 90% dari total UP yang diberikan kepada SKPD yang bersangkutan.

- Pengesahan SPJ merupakan dasar pembuatan SPP GU oleh bendahara pengeluaran
- Dalam Aplikasi SIKD, SPP-GU tidak dapat dibuat jika belum ada pengesahan SPJ.
- Jumlah nilai SPP-GU sama dengan jumlah nilai pengesahan SPJ.

c) SPP Tambah Uang (SPP-TU)

Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPP-TU. SPP TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanaan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak digunakan untuk pembayaran langsung.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK dalam rangka tambahan uang persediaan. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pengguna ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Dalam hal dana tambahan

uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa uang tambahan disetor ke rekening umum daerah.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan SPP-TU dengan menggunakan Aplikasi SIKD, diantranya:

- SPP TU diajukan oleh bendahara pengeluaran dan harus per kegiatan dan dirinci sampai rekening rincian objek.
- Sekalipun SPP-TU harus mempunyai rencana penggunaan dana namun SPP-TU ini belum membebani anggaran.
- Rencana penggunaan dana atas pengajuan SPP TU dalam Aplikasi SIKD dijabarkan dalam laporan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU.
- Dalam pengajuan SPP-TU, bendahara pengeluaran selain mencetak laporan SPP juga harus mencetak laporan surat keterangan pengajuan SPP TU yang berisi rencana penggunaan TU sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses pengajuan SPP TU dengan menggunakan Aplikasi SIKD.
- Pertanggungjawaban TU dan penyetoran sisa TU (jika ada) sampai penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil oleh BUD harus dilakukan terlebih dahulu jika TU berikutnya untuk kegiatan yang sama akan diajukan. Jika prosedur ini tidak dilakukan terlebih

dahulu, maka dengan Aplikasi SIKD TU berikutnya tidak bisa dibuat.

- Pada Aplikasi SIKD, pertanggungjawaban TU akan diakui sah ketika BUD telah menerbitkan SP2D Nihil atas TU tersebut

Siklus transaksi TU secara lengkap sesuai Aplikasi SIKD adalah sebagai berikut:

- Pembuatan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran
- Verifikasi SPP-TU oleh PPK SKPD
- Setelah diverifikasi dan disetujui, kemudian disiapkan SPM TU oleh PPK SKPD
- BUD menerbitkan SP2D-TU jika disetujui
- Bendahara pengeluaran membuat SPJ atas penggunaan dana TU persediaan tersebut dan menyetorkan sisa TU jika ada.
- PPK SKPD mengesahkan SPJ-TU.
- Berdasarkan pengesahan SPJ-TU, bendahara pengeluaran membuat SPP nihil.
- PPK melakukan verifikasi atas SPP nihil dan menyiapkan SPM nihil.
- Berdasarkan SPM nihil, maka BUD menerbitkan SP2D nihil atas TU tersebut.

d) SPP Langsung (SPP-LS)

Mekanisme pengajuan permintaan dana oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPD juga dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD.

Hal-hal yng harus diperhatikan dalam mekanisme pembayaran langsung dengan menggunakan Aplikasi SIKD adalah:

- SPP-LS dibuat oleh bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen yang telah disiapkan oleh PPTK untuk belanja pada pihak ketiga. PPK melakukan verifikasi atas SPP-LS, kemudian atas dasar itu dibuat SPM-LS
- Untuk pengajuan SPP-LS untuk gaji yang mendahului pengesahan anggaran dapat dilakukan selama anggaran untuk gaji sudah diinput pada RKA, dilakukan posting pergeseran dan diinputkan data SPD pada Aplikasi.

5) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Setelah proses pengajuan SPP oleh bendahara pengeluaran maka PPK harus melakukan verifikasi dan menyiapkan SPM untuk disetujui oleh pengguna anggaran. Hal ini sesuai dengan pasal 21 Permendagri No. 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Jika dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, maka pengguna anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM. SPM kemudian diajukan kepada BUD sebagai otorisasi yang akan melakukan pencairan dana.

Penerbitan SPM dengan Apliksi SIKD harus memperhatikan:

a) Setelah proses SPP dari bendahara pengeluaran harus dilakukan proses PPK.
b) Jika proses verifikasi tidak dilakukan, SPM tidak dapat disiapkan oleh PPK dengan Aplikasi SIKD.

6) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1 pengertian SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Oleh karena itu setelah PPK menyiapkan SPM yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran, maka SPM tersebut dapat dimintakan pencairan dana kepada BUD untuk diterbitkan SP2D.

Mekanisme penerbitan SP2D secara umum adalah sebagai berikut:

a) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran yang diajukan kepada bank operasinal mitra kerjanya.
b) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan UP, GU, dan TU kepada pengguna anggaran.
c) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Dengan menggunakan Aplikasi SIKD, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka penerbitan SP2D, antara lain:

a) SP2D merupakan dokumen yang dijadikan dasar pengakuan belanja.
b) Pengakuan belanja dilakukan secara otomatis oleh Aplikasi SIKD saat dokumen ini dibuat sehingga penerbitan SP2D merupakan dasar pencatatan atas semua transaksi belanja.

7) Pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Permendagri No. 13 tahun 2005 pasal 189 ayat 3 menyatakan bahwa bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung-jawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan

pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme UP, GU, dan TU persediaan.

Dengan menggunakan Aplikasi SIKD, dalam pembuatan pertanggungjawaban harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pertanggungjawaban (SPJ) hanya untuk uang persediaan yang telah diterbitkan SP2D untuk pembayaran UP, GU, TU.
b) SPJ UP/GU dapat dilakukan untuk beberapa kegiatan sekaligus.
c) SPJ TU hanya dapat dilakukan per kegiatan.
d) SPJ UP/GU merupakan dasar dalam pembuatan GU berikutnya.
e) SPJ TU merupakan dasar pembuatan dokumen untuk pengakuan belanja oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
f) Pertanggungjawaban dapat berasal dari transaksi panjar (pemerintah daerah bersangkutan) dan selain panjar (bendahara pengeluaran).

2. Technology Acceptance Model (TAM)

Model TAM yang dikembangkan oleh Davis F.D (1989) merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam penelitian TI (Iqbaria.et.al : 1997 dalam Titis : 2008) karena model ini lebih sederhana, dan mudah diterapkan. Model TAM sebenarnya diadopsi dari model The Theory of Reasoned Action (TRA), yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh Fishbe dan Ajzen (1975), dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi

seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut.

Menurut Davis (1989) teori ini membuat model perilaku seseorang sebagai suatu fungsi dari tujuan perilaku. Tujuan perilaku di tentukan oleh sikap atas perilaku tersebut. Dengan demikian dapat di pahami reaksi dan persepsi pengguna teknologi informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan penggunaan teknologi informasi. Empat faktor yang dapat mempengaruhi adalah kemudahan penggunaan, persepsi pengguna atas kemanfaatan, sikap terhadap penggunaan, dan perilaku untuk tetap menggunakan teknologi informasi sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks penggunaa teknologi informasi, sehingga alasan seseorang dalam melihat kemudahan, manfaat, sikap, dan perilaku penggunaan teknologi informasi menjadikan tindakan orang tersebut dapat menerima penggunaan teknologi informasi.

Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis menjelaskan perilaku pengguna komputer, yaitu berlandaskan pada kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), intensitas (*intention*) dan hubungan perilaku pengguna (*user behavior relationship).* Tujuan model ini untuk menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku pengguna teknologi informasi tehadap penerimaan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Model TAM secara lebih terperinci menjelaskan penerimaan teknologi informasi dengan dimensi-dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya teknologi informasi oleh pengguna akhir (*user*). Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku

pengguna dengan empat variabel yaitu persepsi tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*), dan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*).

Secara empiris model ini telah terbukti memberikan gambaran pada aspek perilaku pengguna teknologi informasi seperti komputer, dimana banyak pengguna komputer dapat dengan mudah menerima teknologi informasi karena sesuai dengan apa yang diinginkannya (Iqbaria,et.al:1997). Keempat variabel model TAM dapat menjelaskan aspek keperilakuan pengguna (Davis: 1989). Dengan menggunakan variabel tersebut maka TAM diharapkan dapat menjelaskan penerimaan pemakai sistem informasi terhadap teknologi informasi itu sendiri.

a. Persepsi tentang kemudahan penggunaan

Menurut Davis (1989) persepsi tentang kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. Konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaan SI dan kemudahaan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai. Indikator kemudahan penggunaan teknologi informasi meliputi kemudahan mempelajari, mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan pengguna, menigkatkan keterampilan, kemudahan pengoperasian.

Kemudahan penggunaan adalah konsep yang telah mendapatkan perhatian dalam kepuasan pengguna dalam penggunaan teknologi sistem informasi. Mempertimbangkan argumen yang jelas oleh usaha individu untuk menjadi sumber daya langka, sehingga seorang individu seharusnya rela untuk mengalokasikan lebih banyak kesempatan. Oleh karena itu, sebuah sistem yang memerlukan usaha kecil dikatakan lebih mudah digunakan daripada sistem yang memerlukan usaha lebih besar.

b. Persepsi kemanfaatan

Persepsi kemanfaatan menurut Davis (1989) didefinisikan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dengan produktivitas, kinerja tugas, efektivitas, dan pentingnya suatu tugas. Menurut Arif (2007) dimensi kemanfaatan terdiri dari dimensi kegunaan yaitu menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, serta menambah produktivitas. Sedangkan dimensi efektivitas yaitu mempertinggi efekivitas dan mengembangkan kinerja pekerjaan.

c. Sikap terhadap penggunaan

Sikap terhadap penggunaan dalam TAM menurut Davis (1989) dikonsepkan sebagai sikap yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bagi seseorang menggunakan suatu teknologi dalam

pekerjaannya. Sikap merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku individual. Sikap seseorng terdiri dari atas unsur kognitif/cara pandang, afektif, dan komponen-komponen yang berkaitan dengan perilaku. Fishben dan Ajzen (1980) dalam Titis mendefinisikan sikap sebagai perasaan positif dan negatif seseorang terhadap penggunaan suatu sistem dan menyatakan bahwa sikap dapat dipengaruhi faktor-faktor psikologis dan situasi yang ditemui.

d. Perilaku untuk tetap menggunakan

Imam (2009) mendefenisikan perilaku penggunaan sebagai kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut, misalnya keinginan untuk menambah fitur pendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, dan memotivasi pengguna lain (Davis : 1989). Sikap perhatian untuk menggunakan adalah prediksi yang baik dalam keberhasilan pengimplementasian suatu teknologi sistem informasi.

Menurut *the theory planned behavior*, tindakan individu pada perilaku tertentu ditentukan oleh minat individu tersebut untuk melakukan perilaku (Azjen: 1975 dalam M. Rafky & Syahran: 2008). Menurut Arief (2007) tingkat penggunaan teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut misalnya keinginan menambah

peripheral/*software* pendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain.

Kesimpulannya adalah model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna akan menentukan sikapnya dalam penerimaan penggunaan teknologi informasi. Model ini secara lebih jelas menggambarkan bahwa penerimaan penggunaan teknologi informasi dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan (*ease of use*), kemanfaatan (*usefulness*), sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*), dan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*). Keempatnya memiliki determinan yang tinggi dan validitas yang sudah teruji secara empiris (Chau : 1996).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Titis (2008) yang menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat dan kepercayaan konsumen terhadap pengaplikasian layanan mobile banking. Hasilnya persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap penggunaan mobile banking dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan mobile banking.

Kemudian penelitian yang dilakukan Arief (2007) yang membahas kajian tentang perilaku pengguna sistem informasi mahasiswa dan akademik berbasis web (SIMA web) dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Hasilnya persepsi terhadap penggunaan berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan sistem

informasi mahasiswa dan akademik berbasis web, persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan sistem informasi mahasiswa dan akademik berbasis web, persepsi sikap penggunaan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan sistem informasi mahasiswa dan akademik berbasis web, dan perilaku untuk tetap menggunakan berpengaruh terhadap sistem informasi mahasiswa dan akademik berbasis web. Tidak diterimanya hipotesis ketiga pada penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh antara persepsi tentang dengan sikap penggunaan terhadap keberhasilan sistem informasi. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa para responden (mahasiswa) memang dituntut untuk mengakses web karena sebagian besar fitur web, meliputi prosedur Kartu Rencana Studi (KRS) informasi bimbingan tugas akhir, tugas-tugas perkuliahan, pemilihan kelompok dan berbagai fitur lainnya, harus digunakan selama mereka studi. Dengan demikian mudah atau tidaknya web digunakan tidak akan mempengaruhi sikap responden terhadap penggunaan teknologi tersebut.

Imam (2009) yang meneliti tentang analisis *technologi acceptance model* terhadap perpustakaan digital dengan *structural equation modeling* menyatakan bahwa terdapat pengaruh desain portal, organisasi *e-resource,* dan kemampuan pengguna terhadap kemudahan penggunaan perpustakaan digital. Kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi manfaat perpustakaan digital. Serta persepsi manfaat berpengaruh terhadap sikap ke arah penggunaan dan niat untuk tetap menggunakan perpustakaan digital.

C. Pengembangan Hipotesis

7. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi kemanfaatan dan sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Menurut Tsui Wa (2002) dalam Titis (2008), persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu persepsi dimana seseorang akan berpikir bahwa betapa mudahnya menggunakan suatu teknologi infomasi dalam mendukung aktivitasnya. Kemudahan penggunaan akan berpengaruh terhadap manfaat dan sikap penggunaan suatu teknoloogi informsi tersebut (Davis : 1989).

Seddon (1997) melakukan penelitian untuk melihat adanya hubungan antara kualitas informasi dengan *perceived usefulness.* Jika pengguna *software* akuntansi yakin dengan kualitas sistem yang digunakannya, dan merasakan bahwa menggunakan sistem tersebut tidak sulit, maka mereka akan percaya bahwa penggunaan sistem tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dan akan meningkatkan kinerja mereka. Jika informasi yang dihasilkan dari *software* akuntansi yang digunakan semakin akurat, tepat waktu, dan memiliki reliabilitas yang baik, maka akan semakin meningkatkan sikap penerimaan pemakai sistem tersebut. Peningkatan kepercayaan pemakai sistem informasi, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja mereka.

Beberapa indikator kemudahan penggunaan teknologi informasi meliputi:

a. Teknologi informasi sangat mudah dipelajari

b. Teknologi informasi mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna.
c. Teknologi informasi sangat mudah untuk meningkatkan keterampilan pengguna.
d. Teknologi informasi sangat mudah untuk dioperasikan.

Berdasarkan indikator kemudahan penggunaan maka diasumsikan bahwa pengguna Aplikasi SIKD akan merasa mudah dan tidak menemui kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. Berkaitan dengan tujuan itu maka BPKP sebagai pihak pengembang Aplikasi SIKD akan merancang dan berusaha agar pengguna akhir (*user*) dari Aplikasi SIKD tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya.

Dalam rangka pengenalan Aplikasi SIKD di pemerintah daerah BPKP melakukan pelatihan kepada pengelola keuangan di setiap SKPD yang meliputi pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat palaksana teknis kegiatan, dan bendahara yang terdiri dari bendahara pengeluaran, bendahara gaji, bendahara penerimaan, dan bendahara barang. Setiap pengguna Aplikasi SIKD akan diberikan *user name* dan *password* untuk melakukan *log-in* agar keamanan data tetap terjaga.

Karakteristik utama dari kemudahan penggunaan adalah kemudahan implementasi Aplikasi SIKD untuk dimengerti oleh pengelola di SKPD. Maka jika sebuah teknologi informasi dalam hal ini Aplikasi SIKD dapat dengan

mudah digunakan oleh penggunanya, maka otomatis aplikasi tersebut dapat mencapai tujuan untuk menghasilkan LKPD yang andal.

H_1: *Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi kemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*

H_2: *Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*

8. Pengaruh persepsi kemanfatan terhadap sikap penggunaan dan perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Davis (1989) mendefinisikan kemanfaatan (*usefulness*) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subyek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja, menambah produktivitas, dan peningkatan prestasi kerja serta kinerja orang yang menggunakannya. Kemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna TI dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam (2009) yang meneliti tentang penerimaan perpustakaan digital menunjukkan hasil bahwa persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap sikap pengguna perpustakaan digital. Persepsi kemanfaatan akan berpengaruh langsung terhadap sikap dan perilaku

untuk tetap menggunakan teknologi informasi. Artinya jika pengguna semakin merasakan manfaat dari suatu sistem informasi maka sikapnya akan menunjukkan sikap penerimaan. Begitu juga apabila pengguna merasakan manfaat yang nyata dari penggunaan teknologi sistem informasi maka mereka akan cenderung untuk tetap menggunakan teknologi tersebut dikemudian hari. Dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi meliputi:

a. Kegunaan, meliputi dimensi menjadikan pekerjaan lebih mudah, bemanfaat, dan menambah produktivitas.
b. Efektivitas, meliputi dimensi pengmbangan kinerja pekerjaan.

Persepsi manfaat dalam implementasi Aplikasi SIKD merupakan kondisi yang diperoleh dalam membantu pengelola keuangan dalam pembuatan LKPD. Suatu aplikasi akan bermanfaat jika aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Maka BPKP sebagai pihak pengembang akan merancang Aplikasi SIKD sesuai kebutuhan pemerintah daerah dalam penyusunan LKPD dengan tujuan mengahasilkan LKPD beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka tingkat kemanfaatan Aplikasi SIKD mempengaruhi keberhasilan imlementasi Aplikasi tersebut.

H_3: *Persepsi kemanfatan berpengaruh signifikan positif terhadap sikap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuagan Daerah (SIKD)*

H_4: *Persepsi kemanfatan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*

9. Pengaruh sikap penggunaan terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sikap penggunaan menurut Davis (1989) diartikan sebagai sikap yang berbentuk penerimaan atau penolakan jika seseorang menggunakan suatu teknologi informasi baru dalam membantu pekerjaannya. Fahmi (2006) mengemukakan bahwa faktor sikap sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku individual untuk tetap menggunakan teknologi informasi. Sikap seseorang terdiri atas unsur cara pandang (*cognitive*) dan perilaku (*behavioral*). Jika cara pandang mereka akan suatu teknologi sistem informasi menunjukkan arah positif maka besar kemungkinan besar perilaku mereka akan mengarah pada arah yang positif juga, berarti mereka akan tetap menggunakan teknologi sistem informasi secara terus menerus.

Sikap penggunaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Aplikasi SIKD diimplementasikan di pemerintah daerah. Jika sikap pengguna aplikasi menunjukkan sikap penerimaan maka akan sangat membantu dalam penyusunan LKPD sehingga bisa berjalan dengan efisien dan tepat waktu serta mengasilkan opini WTP. Sebaliknya jika sikap pengguna lebih cenderung ke arah penolakan maka penyusunan LKPD pemerintah daerah menggunakan Aplikasi SIKD akan mengalami kendala sehingga akan berdampak pada opini yang kemungkinan Tidak Wajar bahkan Discalaimer.

H_5: *Persepsi sikap penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*

10. Pengaruh perilaku untuk tetap menggunakan terhadap keberhasilan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Menurut Davis (1989) kecenderungan perilku untuk tetap menggunakan suatu sistem informasi pada seseorang dapat diprediksi dari sikap dan perhatiannya terhadap teknologi informasi tersebut. Sikap yang menunjukkan keinginan untuk menambah fitur pendukung, adanya motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi orang lain untuk menggunakan teknologi informasi tersebut sangat mendorong keberhasilan adopsi suatu teknologi sistem informasi.

Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri sebagai pengembang Aplikasi SIKD pasti sangat berharap adanya motivasi pemerintah daerah untuk tetap menggunakan aplikasi tersebut secara terus-menerus. Dengan menyediakan layanan yang baik seperti memberikan pelatihan, memberikan modul panduan penggunaan, serta melayani keluhan jika terjadi permasalahan (*troubleshooting*) dalam implementasi Aplikasi SIKD maka diharapkan pengguna bisa mendapat kenyamanan menggunakan aplikasi. Sehingga dengan melihat keluhan dari pengguna, maka Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri bisa memberikan solusi terbaik untuk memecahkan keluhan tersebut, mungkin

dengan penambahan fitur-fitur terbaru sesuai kebutuhan pengguna dan mengikuti perkembangan zaman.

H_6: *Perilaku untuk tetap menggunakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu keberhasilan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai variabel dependen dengan persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, persepsi sikap penggunaan dan perilaku untuk tetap menggunakan sebagai variabel independen.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

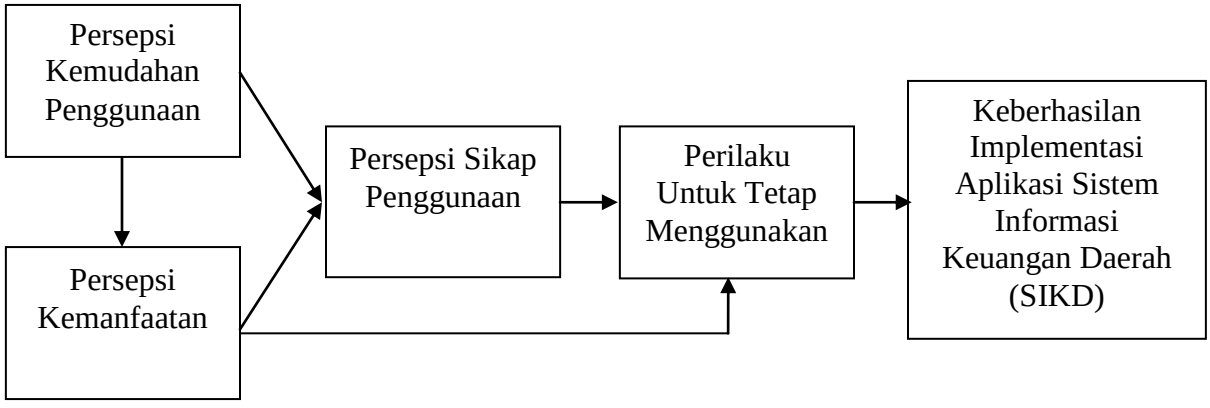

Gambar 2
Kerangka Konseptual

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Persepsi Kemanfaatan, Sikap Pengguna dan Perilaku Untuk Tetap Menggunakan sebagai Variabel *Intervening*. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap Persepsi Kemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
2. Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap Sikap Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
3. Persepsi Kemanfaatan berpengaruh signifikan positif terhadap Sikap Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
4. Persepsi Kemanfaatan berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Untuk Tetap Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
5. Persepsi Sikap Pengguna berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Untuk Tetap Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

6. Perilaku Untuk Tetap Menggunakan berpengaruh signifikan positif terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan.
2. Dikarenakan beberapa SKPD yang memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner, menyebabkan data yang diolah kurang optimal, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebarkan.
3. Pilihan jawaban yang peneliti ajukan tidak mewakili semua aspirasi dari responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.
4. Dari semua SKPD yang ada di Kota Padang, hanya Dinas saja yang memiliki Kepala Bidang, sedangkan Kantor, Badan, Kecamatan, dan Inspektorat hanya memiliki Kepala Seksi. Oleh karena itu, peneliti menambahkan dalam responden Kepala Bidang atau *Middle Manager*.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat lebih baik jika, penelitian ditambah variable-variabel lain yang menentukan Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
2. Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah dinilai baik. Namun, harus lebih ditingkatkan lagi. Diantaranya dengan mempermudah memberikan pelatihan yang mendalam tentang aplikasi SIKD pada staff akuntansi, SKPD seharusnya memilih orang yang tepat untuk manjalankan aplikasi SIKD sehingga tidak terjadi kesalahan yang fatal.
3. Untuk pemerintah daerah, hendaknya lebih meningkatkan Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kemanfaatan, Sikap Pengguna dan Perilaku Untuk Tetap Menggunakan sehingga Keberhasilan Implementasi Aplikasi SIKD menjadi lebih baik.